

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang digambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengukuhan PAI sebagai bagian dari mata kuliah yang harus diajarkan di lembaga pendidikan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN) cukup berliku. Pada awalnya, PAI di PTUN bukan lah menjadi mata kuliah yang mendapatkan perhatian utama yang ditunjukkan oleh minimnya bobot atau alokasi waktu yang ada. Menguatnya Islamisme di PTUN dengan varian yang cukup kompleks berdampak pada munculnya kesadaran tentang arti penting PAI di lembaga pendidikan tinggi, sehingga statusnya menjadi mata kuliah wajib dan mendapatkan prioritas penting. Pembahasan sebelumnya juga menunjukkan, setidaknya, varian-varian Islam yang berkembang di tanah air, termasuk di lingkungan PTUN meliputi; Tarbiyah-Ikhwani Muslimin (Tarbiyah-IM) yang kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII), Salafi-Wahhabisme, Jama'ah Islamiyah (JI), Jama'ah Tabligh (JT), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
2. PAI di UNESA yang merupakan salah satu PTUN di Surabaya juga memperlihatkan fenomena yang sama. Pada awalnya, PAI merupakan mata kuliah yang kurang diperhitungkan di kampus tersebut. Seiring dengan semakin kuatnya kesadaran elit birokrasi kampus terhadap arti

penting Islam, maka PAI menjadi bagian mata kuliah yang bukan saja wajib, melainkan juga sangat penting kedudukannya. Seperti halnya di PTUN-PTUN lainnya, Islamisme juga tumbuh dan berkembang di kampus UNESA. Hanya saja, varian-varian Islamisme tidak memiliki kompleksitas sebagaimana yang ditemukan di kampus-kampus lain. Hasil penelusuran menunjukkan, varian Islamisme yang tumbuh dan berkembang sampai saat ini meliputi Forum Mahasiswa Unesa (FORMUSA), Forum Ukhwah Mahasiswa Islam (FUMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perkembangan varian-varian Islamisme ini berkelindan dengan upaya serius birokrasi kampus untuk menempatkan PAI sebagai pilar penting penanaman moderatisme Islam yang dapat menghentikan atau setidaknya menghambat perkembangan Islamisme di lingkungan kampus, terutama di kalangan mahasiswa.

3. Kehadiran PAI sebagai pilar moderatisme Islam di kampus UNESA ternyata tidak serta merta berhasil secara gemilang menggerus eksistensi dan keberlanjutan Islamisme di UNESA. Sebaliknya, Islamisme dengan berbagai variannya masih tetap berkembang dan mentransformasikan ideologi dan gerakannya, terutama di kalangan mahasiswa. Masih bertahannya Islamisme di UNESA didukung oleh banyak faktor, seperti kuatnya kohesi sosial (*group inclusiveness*) yang ditandai oleh kuatnya komponen relasional dan komponen ideasional diinternal organisasi-organisasi Islamisme. Pada saat yang sama, mereka juga dapat bertahan dengan melakukan kontestasi dengan PAI maupun kebijakan birokrasi

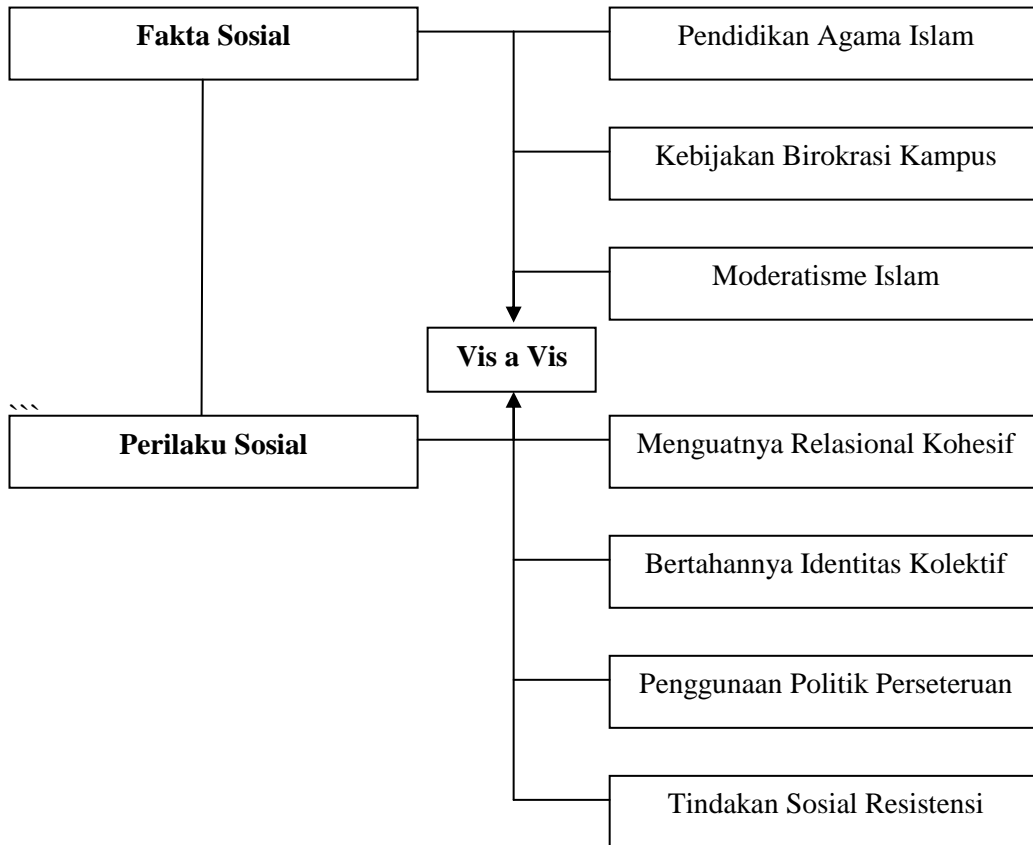
kampus. Kontestasi menjadi satu kebutuhan untuk mempertahankan Islamisme dari gempuran PAI dan kebijakan birokrasi yang mewakili arus kuat moderatisme Islam.

B. Implikasi Teoritik

Persandingan atau persinggungan antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Islamisme di UNESA memberi petunjuk penting bahwa, kerangka teoritik Durkheim tentang fakta sosial dan perilaku sosial tidak memadai lagi digunakan sebagai perspektif teoritik. Hal ini berarti, hasil penelitian ini semakin mengukuhkan kritik Weber maupun para teoritis sosiologi lain yang memiliki pandangan kritis yang sama terhadap Durkheim.

Salah satu kritik yang dapat diajukan adalah, kegagalan teori kesadaran kolektif (*conscience collective*) individu-individu yang berada dalam struktur sosial yang sama. Kesadaran kolektif masing-masing individu ini lah yang mengantarkan mereka menerima fakta sosial sebagai bagian terpenting membentuk konsensus normatif dalam perilaku sosial. Kegagalan teori kesadaran kolektif ini akan menjadi nyata, jika dikaitkan dengan bagan berikut:

Bagan 1
Kerangka Teorik Yang Dihasilkan



Kesadaran kolektif, jika dikaitkan dengan bagan diatas, menjadi bagian dari perilaku sosial masing-masing individu dalam satu struktur sosial yang sama. Sebagaimana dikutip Campbell, bagi Durkheim, kesadaran kolektif merepresentasikan keseluruhan gagasan yang dimiliki bersama oleh para individu dalam satu struktur sosial yang sama, dan yang menjadi tujuan dan maksud-maksud kolektif. Gagasan tersebut akan tetap menjadi kesadaran kolektif, selama “dipercayai secara umum dan dianut secara normatif”. Pada tahap selanjutnya, ketika keseluruhan kepercayaan normatif memiliki implikasi-implikasi bagi hubungan-hubungan sosial masing-masing individu,

maka akan membentuk “sistem tertentu dengan fungsi mengatur kehidupan dalam masyarakat dan karenanya menetapkan kesatuannya”. Fungsi sistem diterima begitu saja oleh masing-masing individu dan menjadi bagian dari “hidup sadar para individu itu yang mereka miliki bersama berkenaan dengan kehidupan bersama mereka”. Oleh karena, tidak mengherankan, jika Durkheim menegaskan bahwa, kesadaran kolektif lebih merupakan “sebuah konsensus normatif yang mencakup kepercayaan-kepercayaan keagamaan atau kepercayaan-kepercayaan lain yang menyokongnya”.¹

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana proses yang melatarinya sehingga individu-individu yang memiliki gagasan, tujuan dan maksud-maksud yang berbeda-beda dapat menerima konsensus gagasan, tujuan dan maksud bersama? Sementara pada saat yang sama, meskipun makin banyak kesempatan bagi individu-individu untuk mengartikulasikan otonomi gagasan, tujuan dan maksud mereka, tetap saja tidak membuat individu terpisah dari kesadaran kolektifnya. Jika pada akhirnya kesadaran kolektif hilang akibat semakin meluasnya individu, tetap saja ada harapan kembalinya kesadaran kolektif. Tetap bertahan atau masih ada harapan kembalinya kesadaran kolektif bagi Durkheim, karena adanya “pengaruh yang terus menerus dari peraturan moral bersama yang dimiliki masyarakat keseluruhan”.² Peraturan moral tidak berasal dari individu, melainkan dari luar individu-individu,

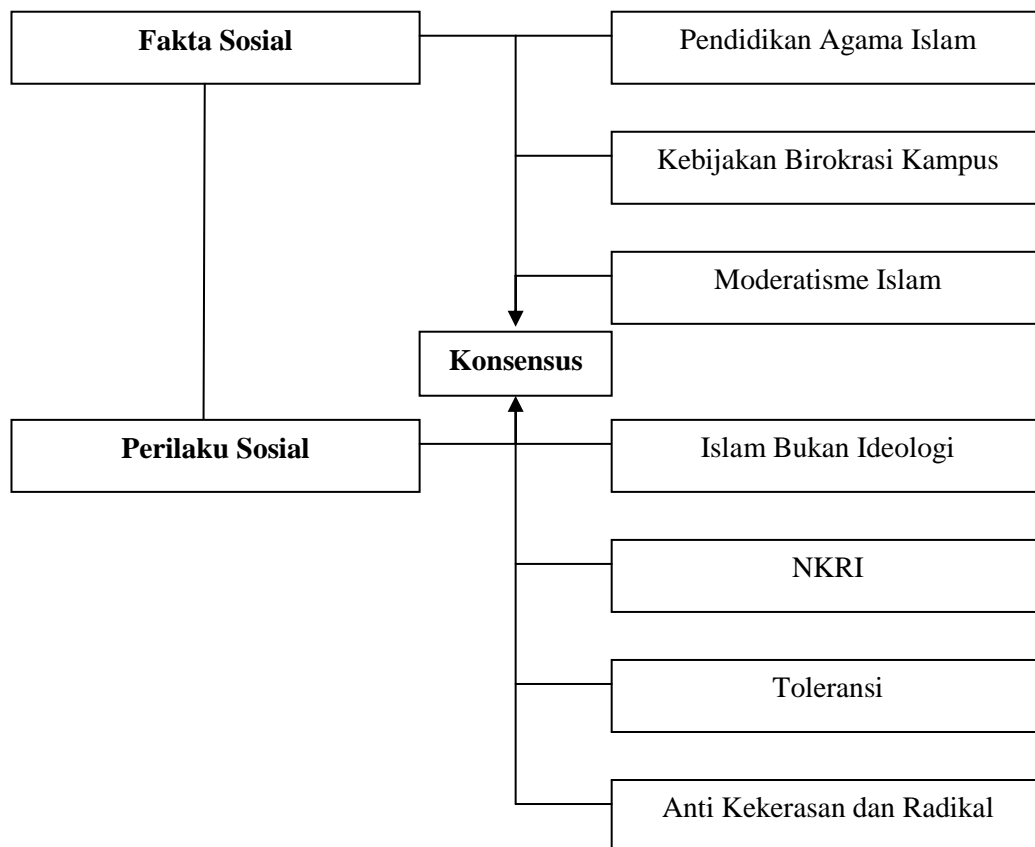
¹ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), 179-180.

² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Modern* terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 185.

eksternal dan koersif atau lebih tegasnya fakta sosial.³ Jadi jelas lah bahwa, kesadaran kolektif sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh peraturan moral yang bersifat eksternal atau lebih tepatnya fakta sosial.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan, maka mestinya menghasilkan skema teoritik sebagai berikut:

Bagan 2
Kerangka Teorik Berdasarkan Perspektif Durkheim



Namun, dalam bagan sebelumnya (*Bagan 1*) justru memperlihatkan fenomena yang sebaliknya dari apa yang diteoritisasikan oleh Durkheim diatas

³ Bandingkan dengan pernyataan Durkheim yang menegaskan, peraturan-peraturan mengenai moralitas “bersifat mengharuskan seperti yang lain-lainnya”. Dapat dikatakan, “peraturan-peraturan itu memaksa individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan (bersama) yang bukan persis dari dirinya sendiri untuk memungkinkan mengenai persetujuan-persetujuan yang lebih besar dari kepentingannya sendiri”. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik*, 186.

(*Bagan 2*). Peraturan-peraturan moral bersama yang dibentuk, disyahkan dan diberlakukan melalui Pendidikan Agama Islam (PAI), didukung oleh kebijakan birokrasi kampus dan berbasiskan pada moratisme Islam tidak berimplikasi pada munculnya kesadaran kolektif di kalangan Islamisme tentang Islam bukan sebagai ideologi Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk Negara yang final, toleran, dan anti kekerasan serta menolak radikalisme Islam.

Sebaliknya, Islamisme dengan berbagai variannya di UNESA justru membangun dan mempertahankan gagasan bersama tentang *group inclusiveness*. Dengan bahasa lain, Islamisme di kampus justru “melawan” gagasan bersama yang dibentuk dan “dipaksakan” oleh fakta sosial melalui pengukuhan dua komponen dalam perilaku sosial mereka, yaitu relasional kohesif dan komponen identitas kolektif. Bagi mereka, fakta sosial dipahami sebagai ancaman yang berpotensi dapat menggerus eksistensi dan keberlanjutan ideologi, teologi, dan gerakan Islamisme yang dibangun. Ditengah ancaman tersebut, bagi mereka, menjaga keutuhan dan kesatuan kelompok merupakan tujuan terpenting yang harus diperjuangkan. Ketercapaian keutuhan dan kesatuan kelompok sangat ditentukan, salah satunya, oleh adanya peranan bersama diinternal varian-varian Islamist dan bukan oleh peranan individu atau elit tertentu. Atas dasar itu, Islamisme sangat menjaga relasional kohesif antar individu-individu yang menjadi bagian didalamnya. Pada saat yang sama, mereka secara kontinyu dan konsisten membangun perspektif oposisi biner antara Islamisme dengan PAI, kebijakan

birokrasi kampus, dan moderatisme Islam. Dengan perspektif oposisional itu, maka gagasan-gagasan tentang Islam, bentuk Negara, toleransi, dan seterusnya adalah kontra produktif dengan gagasan yang direproduksi oleh PAI, kebijakan birokrasi kampus dan moderatisme Islam tentang Islam bukan sekedar ideologi, melainkan melainkan melampaui ideologi itu sendiri. Demikian pula gagasan tentang NKRI, toleransi, anti kekerasan dan radikalisme Islam.

Selain itu, langgam (*reporteir contention*) atau politik perseteruan (*contentinous politic*) juga menjadi bagian tak terpisahkan dan “perlawanan” dengan melakukan resistensi terhadap fakta-fakta sosial yang ada. Sebagai fakta sosial, PAI, Kebijakan Birokrasi Kampus, dan Moderatisme Islam dengan struktur nilai yang dibawa masing-masing dan dihadirkan untuk membentuk perilaku sosial di kampus UNESA justru direspon sebaliknya. Dengan strategi dan taktik yang berbeda, varian-varian Islam secara kontinyu melakukan tindakan sosial “penentangan” dan resistensi terhadap kehadiran fakta sosial tersebut. Dengan tindakan sosial yang dibangunnya itu, mereka tetap dapat mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan organisasi, gerakan, dan aksi-aksinya di UNESA hingga saat ini. Tindakan sosial yang didalamnya merepresentasikan kesadaran kolektif tentang gagasan-gagasan, tujuan-tujuan, dan maksud-maksud yang justru berseberangan dengan apa yang dikehendaki oleh fakta sosial tersebut.

C. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil paparan sebelumnya, menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerhati sejarah PAI dan Islamisme di PTU di pada masa mendatang. Secara garis besar, kebutuhan mendasar dimaksud dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, diperlukan penelusuran lebih mendalam tentang Islamisme di UNESA yang memiliki kecenderungan sangat tertutup. Peneliti pada dasarnya mendapatkan informasi sayup-sayup tentang gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di UNESA, salah satunya. Namun, karena ketertutupan gerakannya, menyebabkan usaha-usaha yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data tidak berhasil. Kebutuhan penelusuran tentang kemungkinan-kemungkinan berkembangnya NII mutlak dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh, varian-varian Islam yang tumbuh dan berkembang di UNESA. Dengan menemukan varian Islamisme lain, selain FUMI, FORMUSA, dan HTI, maka diharapkan potret relasional yang sebenarnya antara PAI dan Islamisme di kampus UNESA dapat dihasilkan.

Kedua, nyaris belum ada penelusuran atau penelitian dengan fokus untuk membandingkan dinamika PAI dan Islamisme antar kampus PTUN. Adalah fakta bahwa, tumbuh dan berkembangnya Islamisme tidak hanya terjadi di UNESA, melainkan juga di kampus-kampus umum Negeri ternama di tanah air, termasuk di Surabaya, Malang, dan Jember. Dengan membandingkan dinamika PAI dan Islamisme di PTUN-PTUN, maka penelitian akan menghasilkan potret yang lebih

nyata kontribusi PAI sebagai garda depan transformasi nilai-nilai moderatisme Islam di kalangan mahasiswa.

E. Penutup

Keseluruhan tulisan ini merupakan hasil penelitian mendalam tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Islamisme dengan berbagai variannya di UNESA. Peneliti sudah mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sungguh pun demikian, peneliti sangat menyadari tentu hasil yang diperoleh masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran demi tercapainya hasil yang lebih maksimal lagi sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan wawasan peneliti sangat peneliti harapkan. Dan sebagai kata akhir, seluruh muatan, materi atau narasi hasil penelitian, secara keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.